

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN PADA PILKADA 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

WULANDARI SAFITRI

Keterwakilan perempuan mempunyai peran penting dalam memulai kebijakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan inklusif. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pemilihan sehingga membutuhkan dukungan kebijakan afirmasi untuk membantu kaum perempuan keluar dari stigma stereotip yang ada di masyarakat. Dalam melakukan hal tersebut Bawaslu membentuk badan *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan, dalam proses perekrutan terdapat beberapa kecamatan yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan *Affirmative action* dalam mendukung keterwakilan perempuan sebesar 30% di Bawaslu Kota Bandar Lampung terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) yaitu implementasi kebijakan yang mengkaji kebijakan melalui 1) karakteristik masalah, 2) karakteristik kebijakan dan 3) faktor lingkungan. Data penelitian berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di Bawaslu Kota Bandar Lampung secara substantif telah diterapkan, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam menjadi anggota panwaslu kecamatan belum mencukupi angka 30%. Keterwakilan perempuan yang menjadi anggota panwaslu kecamatan hanya berjumlah 11 orang dari 60 anggota yang artinya hanya sebesar 18,3% . Catatan terhadap kebijakan tersebut masih terkait kendala internal dan eksternal Bawaslu Kota Bandar Lampung yang memerlukan upaya untuk mendukung keterlibatan perempuan dan bukan hanya sekadar memenuhi kuota saja.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, *Affirmative action*, keterwakilan perempuan, panwaslu kecamatan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF AFFIRMATIVE ACTION POLICY ON WOMEN'S REPRESENTATION IN RECRUTMEN PANWASLU KECAMATAN IN THE 2024 PILKADA (Study at Bawaslu Kota Bandar Lampung City)

By

WULANDARI SAFITRI

Women's representation plays an important role in initiating policies to build a fair and inclusive society. This is a challenge for the government in elections so that it requires affirmative policy support to help women get out of the stereotypical stigma that exists in society. In doing so, Bawaslu formed an ad hoc body, namely the Sub-District Panwaslu, in the recruitment process there were several sub-districts that did not meet the quota for women's representation. This study aims to determine the implementation of the Affirmative action policy in supporting 30% women's representation in the Bandar Lampung City Bawaslu has been implemented as expected. This research uses a qualitative approach conducted using Mazmanian and Sabatier's (1983) theory of policy implementation which examines policies through 1) problem characteristics, 2) policy characteristics and 3) environmental factors. The research data came from interviews and documentation. The results of this study found that the implementation of women's representation policies in the Bandar Lampung City Bawaslu has substantively been implemented, but women's representation in becoming members of the sub-district panwaslu has not yet reached 30%. The representation of women who became members of the sub-district panwaslu only amounted to 11 people out of 60 members, which means only 18.3%. Notes on the policy are still related to internal and external constraints of Bawaslu Bandar Lampung City which require efforts to support women's involvement and not just fulfill the quota.

Keywords: Policy implementation, Affirmative action, women's representation, sub-district panwaslu